



UIN SUSKA RIAU

# PERAN DINAS SOSIAL TERHA DAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

## SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Mencapai  
Gelara Sarjana Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**EMILDA ROSITA**  
**NIM. 12070526791**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1446 H/2024 M**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian dari karya tersebut dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian dari karya tersebut dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Emilda Rosita  
Nim : 12070526791  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi

DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING





Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si  
NIP. 19640508 199303 2 002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M  
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Emilda Rosita  
Nim : 12070526791  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi  
Tanggal Ujian : 19 September 2024

#### Tim Penguji

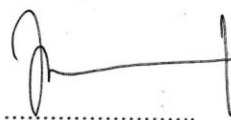
Ketua Penguji  
**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19781025 200604 1 002



Penguji I  
**Dr. Rodi Wahyudi, S.Soc, M.Soc**  
NIP. 19830409 202321 1 016



Penguji II  
**Ikhwani Ratna, SE., M.Si., A.K**  
NIP. 19830827 201101 2 014



Sekretaris  
**Fitria Rahmadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si**  
NIK. 130 717 057





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Emilda Rosita  
 NIM : 12070526791  
 Tempat/Tgl. Lahir : Koto Kumbu, 11 Februari 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* :  
Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di  
Kabupaten Kuantan Singingi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Oktober 2024  
 Yang membuat pernyataan

  
 Emilda Rosita  
 NIM : 12070526791

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

### PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

**EMILDA ROSITA**  
**NIM : 12070526791**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan mengacu pada aspek pendidikan, fasilitasi dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini mengidentifikasi kebijakan dan program yang diterapkan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dinas Sosial Kabupaten Kuantan telah melaksanakan beberapa program pendidikan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Masyarakat menilai bahwa meskipun ada kemajuan yang dicapai melalui program Dinas Sosial, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial perlu memperkuat sistem pendataan, kolaborasi antar instansi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program.

**Kata Kunci:** Peran, Dinas Sosial, Kemiskinan, Kabupaten Kuantan Singingi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan不得以任何 bentuk menyebarkan atau mempublikasikan kembali secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan不得以任何 bentuk menyebarkan atau mempublikasikan kembali secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan mencantumkan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN POVERTY ALLEVIATION IN KUANTAN SINGINGI REGENCY

By:

**EMILDA ROSITA**  
**NIM: 12070526791**

*This study aims to examine the role of Social Services in poverty alleviation in Kuantan Singingi Regency. By referring to aspects of education, facilitation and social welfare. This study identifies policies and programs implemented by the Social Service to improve the quality of life of the community. The method used in this study is qualitative descriptive. The method of data collection is through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the Kuantan Regency Social Service has implemented several education and social protection programs aimed at meeting the basic needs of the poor. The community believes that despite the progress made through the Social Service program, there is a need to increase transparency, accountability, and community participation. To increase the effectiveness of poverty alleviation programs, the Social Service needs to strengthen the data collection system, collaboration between agencies, and increase community participation in the program planning and evaluation process.*

**Keywords:** *Role, Social Service, Poverty, Kuantan Singingi Regency*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumbernya.
  2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA NGANTAR



*Bismillah 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat karunia dan hidaya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi”**. Sholawat berangkaikan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah menata jalan kebenaran dan membawa manusia ke jalan keselamatan di dunia dan akhirat, yang mana berkat beliau la umat manusia dapat keluar dari alam kebodohan kealam berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi salah satu persyaratan yang di ajukan untuk memperoleh gelar S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Keluarga Tercinta Ayahanda Musliadi, dan Ibunda Rosmiati yang telah bersusah payah medidik, membesarkan, memberikan kasih sayang dan do'a yang tulus serta memberikan dukungan moril dan materil. Terimakasih atas semua kesabaran, pengertian untuk penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai bisa menyelesaikan jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Kedua adik saya,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laura Monika dan M. Daffa Alghifari terimakasih telah mejadi mood boster dan mendukung kakaknya dalam menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
4. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
5. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum
6. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si
7. Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
8. Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Mashuri, MA.
9. Ibu Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan memberikan saran, masukan selama penyusunan skripsi.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutka satu-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersatu. Terimakasih atas Ilmu yang Bapak Ibu berikan, Semoga menjadi bekal dan ladang pahal bagi bapak dan Ibu.

11. Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam urusan administrasi di Kampus.

12. Dan terakhir terimakasih kepada diri sendiri, Emilda Rosita karena sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih telah mampu berusaha keras berjuang sampai pada titik ini tidak menyerah dan slalu berusaha memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Pekanbaru, 19 Juli 2024  
Penulis

**EMILDA ROSITA**  
**NIM. 12070526791**

UIN SUSKA RIAU

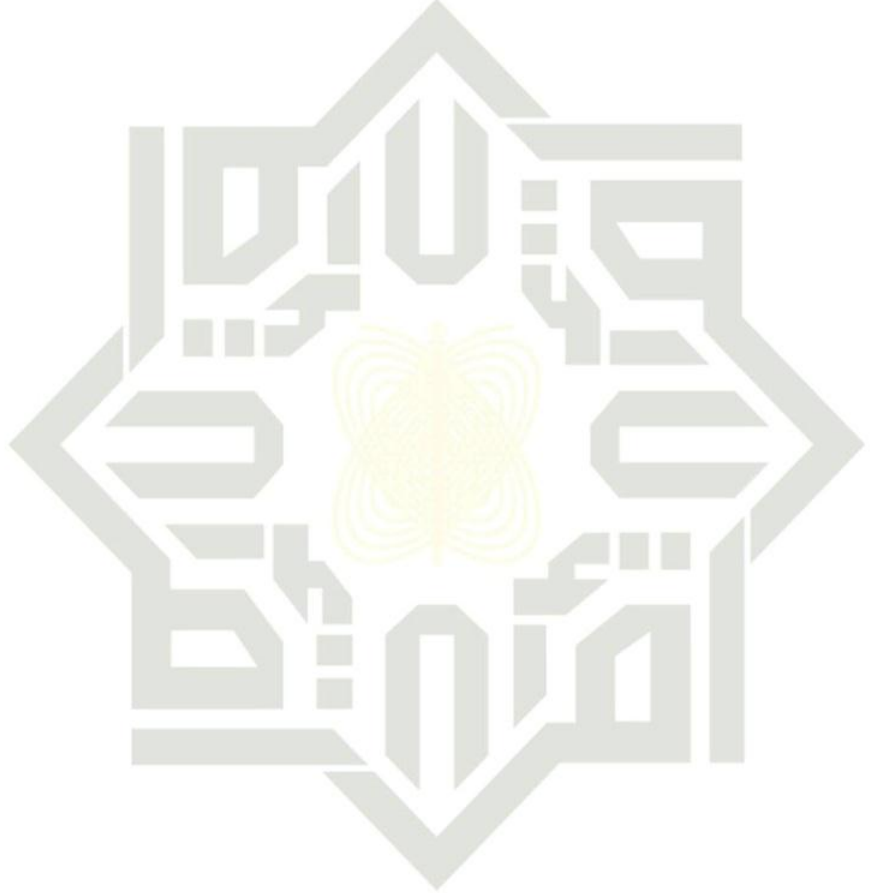
## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Masalah .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	13
2.1 Peran .....	13
2.1.1 Aspek-aspek Peran .....	15
2.2 Kemiskinan .....	15
2.2.1 Penyebab Kemiskinan .....	17
2.2.2 Dampak Kemiskinan .....	19
2.3 Pengentasan Kemiskinan .....	20
2.4 Peran Dinas Sosial .....	23
2.5 Kemiskinan dalam Pandangan Islam .....	26
2.6 Penelitian Terdahulu .....	28
2.7 Defenisi Konsep .....	31
2.8 Konsep Operasional .....	34
2.9 Kerangka Berpikir .....	34
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	36
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
3.3 Informan Penelitian .....	36

3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Analisis Data.....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>41</b>
4.1 Tempat Penelitian.....	41
4.2 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi .....	41
4.3 Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi.....	43
4.4 Sejarah Singkat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi .....	44
4.5 Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi .....	45
4.6 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi .....	49
4.7 Uraian Tugas bagian dan Fungsi/Unit Dinas Sosial .....	50
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Hasil penelitian.....	57
5.1.1 Aspek pendidikan.....	58
5.1.2 Aspek fasilitas.....	67
5.1.3 Aspek kesejahteraan sosial.....	73
5.2 Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh dinas sosial dalam menanggulangi kemiskinan.....	80
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
6.1 Kesimpulan .....	84
6.2 Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Table 1	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota.....	4
Table 1	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kuantan Singingi	8
Table 2	Penelitian terdahulu.....	28
Table 2	Konsep Operasional .....	34
Table 3.1	Informan Penelitian.....	37

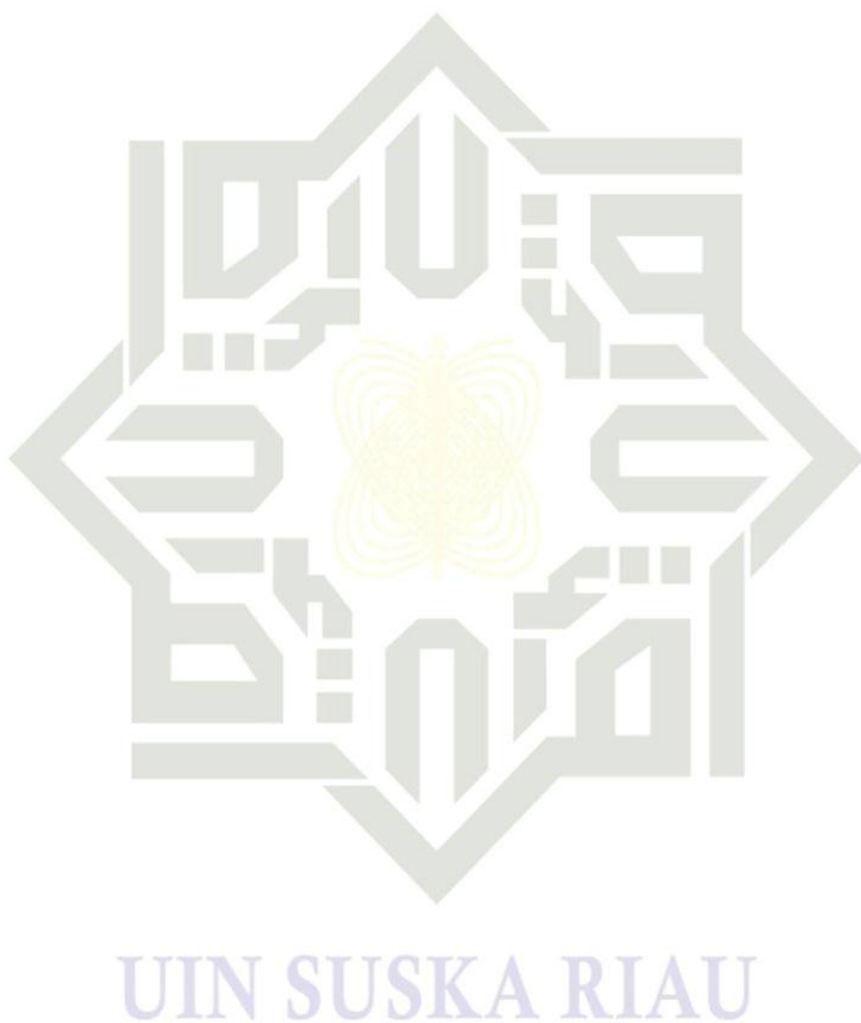


UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi	50



### Hak Cipta Tidak Didukung! Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat sulit untuk diatasi atau dihilangkan di sebagian besar negara berkembang di dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berusaha untuk mengintegrasikan kemiskinan bagi penduduknya. Secara umum Indonesia adalah negara yang memiliki akan sumber daya yang melimpah. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengatur pemanfaatan sumber daya tersebut:

*“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Faktanya bahwa angka kemiskinan masih tinggi menunjukkan bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dari September 2022, 6,36 juta orang Indonesia, atau 9,57% dari populasi, yang hidup dalam kondisi kemiskinan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki keadaan kemiskinan tersebut, bahkan dengan mendeklarasikannya di Tingkat Internasional pada konferensi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dihadiri oleh 189 negara anggota PBB pada bulan September 2000. Deklarasi ini mencakup komitmen para pemimpin dunia untuk mencapai kesepakatan tentang dokumen yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Millenium atau Millinium. Millennium Development Goals mencakup delapan tujuan, termasuk: (1) mengakhiri kemiskinan absolut dan kelaparan pada tahun 2015; (2) mencapai



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mencegah dan mengurangi kemiskinan melalui berbagai cara, antara lain:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dasar bagi semua anak laki-laki dan perempuan; (3) meningkatkan kesetaraan gender dan perempuan; (4) mengurangi tingkat kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV dan penyakit menular lainnya; (7) menjaga kelestarian lingkungan dengan cakupan yang luas; (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Nurhadi,2007). Kemampuan yang berbeda dari masyarakat pelaku ekonomi menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasilnya.

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002) upaya menurunkan tingkat kemiskinan itu telah ada sejak tahun 1970-an melalui program-programnya seperti Simbangan Masyarakat (Bimas) dan bantuan Desa (Bandes). Tapi upaya ini mengalami tahapan yang keruh pada pertengahan tahun 1980-an yang artinya penentasan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah kemiskinan pada awal 1990-an kembali naik. Akibat krisis ekonomi yang terus berlanjut penduduk miskin pada tahun 1998 menjadi 49,5 juta jiwa atau sekitar 14,2 %.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Menurut Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, mengarahkan yang mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk memastikan penetapan sasaran dan program integrasi antar



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dan memperbanyak atau menyebarkan salinannya tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

kementerian/lembaga dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang dipusatkan pada lokasi-lokasi prioritas.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabuapten yang ada di Riau yang sedang menghadapi utuk pengentasan kemiskinan. Menurut data dari pemerintah keuangan, hingga september 2023, realisasi pendapatan negara di Provinsi Riau mencapai sekitar 20,9 triliun atau sekitar 78,71% dari target yang telah ditetapkan. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya jauh lebih baik dari pada provinsi lain dengan anggaran yang kecil. Namun faktanya tidak selalu seperti yang terlihat tedrgantung bagaimana pengelolaannya dan kondisi lainnya, anggaran yang besar tidak dapat menjamin sam memberikan output berupa kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kemiskinan ditandai dengan tidak dapatnya memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, papan, pendidikan, dan perawatan kesehatan akibatnya, banyak orang kekurangan sarana pendukung, seperti dinding rumah kayu yang rusak, dan sebagainya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Tertinggal yang salah satunya berbasis rumah tangga sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.





**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota (Ribu Jiwa)		
	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	28,90	26,61	26,10
Indragiri Hulu	27,35	27,46	27,40
Indragiri Hilir	44,61	43,22	40,86
Pelalawan	49,30	47,84	45,30
Siak	25,77	25,71	26,99
Kampar	68,74	63,55	63,84
Rokan Hulu	74,73	73,81	74,78
Bengkalis	37,66	36,03	36,10
Rokan Hilir	51,97	49,59	53,04
Kepulauan Meranti	48,50	45,25	43,82
Pekanbaru	32,73	35,96	37,67
Dumai	10,57	10,00	10,15
RIAU	500,81	485,03	485,66

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Riau Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota provinsi Riau dari tahun 2021 sampai tahun 2023 penduduk miskin ada yang menurun dan ada yang meningkat pada kurun 3 tahun terakhir.

Dapat dilihat bahwa tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Riau mencapai 500,81 ribu jiwa kemudian, turun ditahun 2022 menjadi 485,03 ribu jiwa dan kembali naik pada tahun 2023 dengan jumlah 485,66 ribu jiwa penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di provinsi riau dapat berubah disebabkan karena adanya faktor-faktor ekonomi dan garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Haksriptamisk UIN Suska Riau  
 Stage Ismi UIN Suska Riau  
 Stage Ismi UIN Suska Riau  
 Stage Ismi UIN Suska Riau
- HandScripta Bilindangi Undang-Undang  
 1. Melarang pemerintah atau seluruh masyarakat untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, pada tahun 2023 , Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah penduduk miskin 26,10 ribu jiwa memiliki presentase penduduk miskin sebesar 6,68%. Angka ini menggambarkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk kabupaten kuantan singingi dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada kondisi ekonomi dan faktor-faktornya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan rakyatnya. Selain itu, pemerintah melakukan upaya ini untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan menunjukkan kepedulian negara terhadap peningkatan kualitas hidup rakyatnya. Untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah mengambil tindakan strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dan tatalembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah harus segera melakukan hal penting untuk menghentikan kemiskinan karena akan menyebabkan masalah tambahan seperti kriminal dan juga permasalahan sosial baru seperti ketelantaran anak, dan tidak optimalnya pengasuh anak oleh keluarga.

Masalah kemiskinan ini sudah sejak lama, kebanyakan orang menjadi miskin bukan karena tidak memiliki makanan, akan tetapi tidak memiliki sumber daya atau fasilitas yang cukup. Selain itu seperti pendapatan, struktur pemerintah defisit anggaran dan lain sebagainya, pemerintahan berfokus untuk menjadikan negara ini sebagai negara maju secara ekonomi ,sangat yakin bahwa kemiskinan merupakan hal yang mutlak yang harus di atasi.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di kabupaten kuantan singingi kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan ditangani. Oleh karena itu, peran pemerintah kabupaten kuantan singingi sangat penting dalam hal ini. Dinas Sosial adalah sebuah lembaga pemerintahan yang berfokus pada pembangunan kesejahteraan sosial, harus memiliki peran yang signifikan dalam memerangi kemiskinan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Masyarakat miskin merupakan warga negara yang sah. Akibatnya, setiap daerah harus memiliki departemen yang bertanggung jawab atas masalah kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Agar warga negara dapat hidup layak dan mampu berkembang menjadi makhluk sosial yang mampan, kesejahteraan sosial masyarakat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosialnya.

Kabupaten kuantan singingi memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan baik dari segi alam, budaya maupun ekonomi, termasuk pertanian, perikanan serta kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya

Dinas Sosial berperan sangat penting dalam mengatasi kemiskinan dengan melalui program program yang telah dibentuk oleh Dinas Sosial yang bertujuan mengatasi kemiskinan yang ada (Arifin,2013).

Kemiskinan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintahan kabupaten kuantan singingi. Meskipun angka kemiskinan di kabupaten kuantan singingi tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten



provinsi Riau lainnya. Dalam rangka mengurangi kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi telah menjalankan berbagai programnya sesuai dengan bidangnya.

Dinas Sosial kabupaten Kuantan Singingi memiliki beberapa bidang yang berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan struktur organisasi, bidang-bidang utama terkait Upaya ini termasuk Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang pemberdayaan Masyarakat, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitas Sosial (LINJAMRESOS), Bidang Pemberdayaan Desa. Setiap bidang tersebut memiliki fungsinya masing-masing, seperti penanganan kelompok rentan, pemberian bantuan sosial, serta pemberdayaan ekonomi Masyarakat miskin.

Maka dari itu, sangat penting bagi pemerintahan di kabupaten Kuantan Singingi untuk memainkan peran dinas sosial sebagai bagian dari lembaga pemerintahan yang berfokus pada pembangunan kesejahteraan sosial dan upaya pengentasan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial Pada Pasal 29 Huruf C menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah memberikan bantuan sosial sebagai mempercepat proses kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan melibatkan beberapa aspek penting yang berfokus pada pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin. Peran utama Dinas Sosial itu adalah mendistribusikan bantuan sosial yang bertugas menyalurkan bantuan seperti







UIN SUSKA RIAU

Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain memberikan bantuan sosial Dinas Sosial juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat miskin, Dinas Sosial menyediakan perlindungan dan rehabilitas bagi kelompok rentan, dan Dinas Sosial juga bekerjasama antar lembaga dengan dinas-dinas lain seperti dinas pendidikan, kesehatan dan lembaga lainnya untuk menciptakan program yang terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Dari hasil pengamatan awal, peneliti melihat kemiskinan di kabupaten kuantan singingi menjadi permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan utamanya. Adapun faktor penyebab terjadinya kemiskinan di kabupaten kuantan singingi di antaranya kualitas pendidikan yang masih dibidang tergolong rendah di beberapa desa. Budaya hidup masyarakat yang malas, serta kebijakan pemerintah yang belum efektif hingga penyalur bantuan yang masih belum tepat sasaran. Seharusnya permasalahan kemiskinan ini sudah dapat diatasi di kabupaten kuantan singingi karena kabupaten kuantan singingi ini banyak sekali memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

**Tabel 1.2 Data Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuantan Singingi**

Kabupaten	Presentase penduduk Miskin (Persen)			Persen
	Kabupaten Kuantan Singingi	2021	2022	2023
	8,97%	8,24%	8,07 %	8,07%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuantan Singingi

© Hakipta milik UIN Suska Riau  
 HAK Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Melarang menjiplak atau menyalin seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mengizinkan dan/atau menyalin atau melakukan penjiplakan dengan cara apapun.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hal-cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data di atas tersebut menunjukkan bahwa bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Singingi mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Data di atas tersebut menunjukkan bahwa bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Singingi mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Data di atas tersebut menunjukkan bahwa bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Singingi mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2023.

Namun demikian Dinas sosial tetap terus berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memerangi kemiskinan melalui beberapa program yang telah dilaksanakan sebelumnya seperti PKH, BLT, pemberi bantuan Pangan Non Tunai dan program lainnya. Meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan di kabupaten Singingi cukup signifikan terutama di daerah perdesaan.

Namun hasilnya belum maksimal karena beberapa masalah yang sering terjadi menyebabkan kegiatan tidak berpotensi berjalan dengan baik. Penetapan penerimaan bantuan dilakukan berdasarkan tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan. Petugas penyalur bantuan sering melakukan kecurangan dengan memasukkan orang-orang terdekatnya seperti kerabat yang tidak layak secara hukum mendapatkan bantuan. Seperti yang di katakan salah satu masyarakat oleh ibu marinda.

*“Biasanya tim atau orang-orang yang melakukan pendataan yang bertugas itu kurang sportif, bisa dikatakan tidak profesional karena masih ada yang melakukan kecurangan seperti mereka memasukan kerabat maupun orang-orang terdekatnya sebagai calon penerimaan bantuan, dan mereka dilihat tidak layak menerima secara hukum dan persyaratan”*

Oleh karena itu diperlukan seberapa baik pemerintah menjalankan kewajiban yang berlaku.

Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis tersebut, maka penulis memiliki alasan yang kuat untuk mencoba melakukan penelitian ini.

Di berbagai permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang **“Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan**

### **Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi”**

#### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanggulangan kemiskinan?
2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten kuantan singingi?

#### **1.3 Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten kuantan singingi?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang di miliki oleh penulis dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam menganalisa peran Dinas Sosial (Disos) dalam penanggulangan kemiskinan.





2. Bagi ilmu pengetahuan hasil dari penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi instansi yang terkait dalam usaha-usahanya menanggulangi angka kemiskinan.
- Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti persoalan yang sama.
- 5. Sistematika Penulisan**
- Dalam penulisan penelitian ini penulis menguraikan sistematika penulisan dalam berbagai bab sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN**
- Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : LANDASAS TEORI**
- Dalam Bab ini menguraikan tentang-tentang Deskripsi Teori, pandangan islam, penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, serta kerangka berpikir.
- BAB III : METODELOGI PENELITIAN**
- Dalam Bab ini meliputi Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, serta Analisis Data.
- BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**
- Dalam bab ini menguraikan Deskripsi Lokasi Penelitian, gambaran umum Kabupaten Kuantan Singingi, sejarah singkat Dinas Sosial



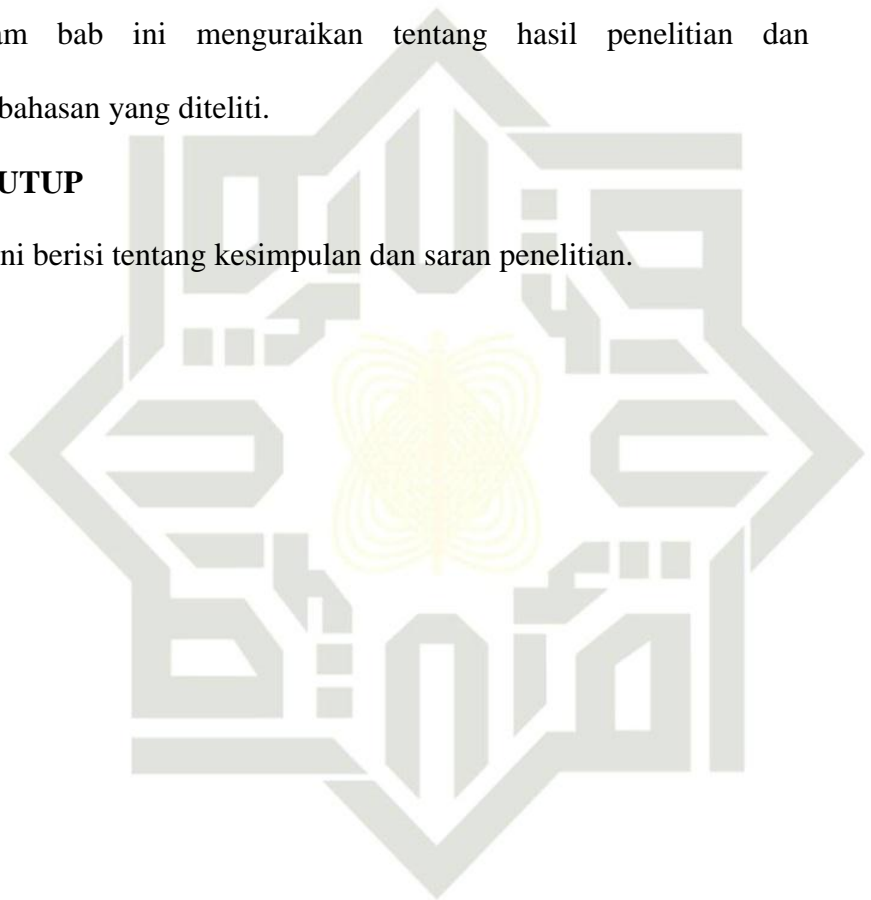
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi.

## **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diteliti.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Peran

Peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat." Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsinya. Peran merupakan rangkaian sebuah tindakan yang terkait dengan posisi tertentu. Berbedanya peran menghasilkan perilaku yang berbeda juga.

Janu, Murdiyatmoko (2007) Peran ialah kumpulan tindakan yang dilakukan dalam posisi tertentu. Perilaku yang berbeda dihasilkan dari peran yang berbeda. Namun, sebagian besar tidak bergantung pada orang yang melakukan posisi tersebut untuk menentukan apakah suatu perilaku cocok dalam satu situasi atau tidak tepat dalam situasi lain.

Menurut John M. Ivancevich, Robert, dan Michael T. Matteson Setiap posisi memiliki peran yang menunjukkan perilaku yang diharapkan dari pemegang jabatan. Merton mendefinisikan peran sebagai pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari orang yang memegang posisi tertentu. Terkait situasi ini, peran juga terkait dengan jenis koneksi yang berkembang antara dua orang yang mempunyai status sosial berbeda. Kemudian, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa komponen dinamis peran adalah status atau kedudukannya. Kinerja seseorang terhadap suatu peran dapat diamati dari tindakannya dalam



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memenuhi tugas dan komitmennya. Aspek dinamis peran diekspresikan dalam tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki atau memegang suatu jabatan dalam menyamakan hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya. Wajar apabila seseorang memainkan peran dengan bagus, dia akan berkehendak bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan kemauan dan keinginannya.

Menurut Komarudin, pengertian peran adalah sebagai berikut:

- Salah satu tanggung jawab utama manajemen
- Perilaku yang diharapkan sejalan dengan status
- Komponen pekerjaan seseorang dalam tim atau lembaga
- Peran yang diantisipasi seseorang atau kualitasnya sendiri
- Bagaimana setiap variabel berkontribusi pada hubungan sebab akibat.

Beberapa dimensi peran adalah sebagai berikut:

- Bertindak sebagai aturan
- Peran sebagai taktik Ini menunjukkan bahwa peran adalah salah satu cara untuk mendapatkan perhatian masyarakat.
- Digunakan sebagai alat komunikasi. Ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut digunakan sebagai alat untuk menerima masukan data untuk proses pengambilan keputusan. Pencitraan ini berpusat pada gagasan bahwa pemerintah berfungsi untuk membantu masyarakat, menjadikan pendapat masyarakat sebagai komponen penting dalam proses pengambilan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bertindak sebagai alat penyelesaian konflik. Ini menunjukkan bahwa peran digunakan untuk mengurangi atau menyelesaikan ketidaksepakatan di antara sudut pandang yang sudah ada melalui tindakan.

## 2.1 Aspek-Aspek Peran

Etimologi teori peran dibagi menjadi empat oleh Biddle dan Thomas yaitu:

1. Peran sebagai peserta interaksi sosial
2. Peran sebagai ikatan dengan individu dan perilaku
3. Peran sebagai perilaku terkait hubungan
4. Peran sebagai kedudukan individu dalam kaitannya dengan perilaku

Peran dalam tatanan hukum mencakup tanggung jawab, wewenang, dan strategi yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Dalam situasi ini, peran dibagi menjadi:

1. Fungsi normatif adalah fungsi yang dimainkan oleh individu atau organisasi berdasarkan kelompok norma sosial.
2. Peran ideal adalah peran yang dimainkan oleh seseorang atau organisasi sesuai dengan nilai-nilai yang tepat atau tempatnya dalam sistem.
3. Pekerjaan faktual adalah seseorang atau organisasi yang didasarkan pada fakta sosial, ilmu pengetahuan, atau peristiwa sosial yang sebenarnya.

## 2.2 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan yang penuh dengan kekurangan yang tidak diinginkan oleh orang yang miskin. Tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, gizi, dan kesejahteraannya menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Sumber daya manusia yang terbatas dimiliki dan





© Paksiptam, mik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan, terutama di tingkat pendidikan formal dan nonformal, menyebabkan kemiskinan, yang mengakibatkan pendidikan informal yang kurang (Sapriana, 2000:196).

Ada tiga jenis pemahaman tentang kemiskinan: kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum adalah alasan kebijakan pembangunan tidak dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat, yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan, yang menyebabkan kemiskinan relatif. Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktur dan elemen budaya lokal yang membelenggu seseorang disebut kemiskinan struktural dan kultural (Sudantoko, 2009)

Kemiskinan adalah masalah abadi yang dihadapi manusia. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki standar hidup yang rendah dibandingkan dengan orang lain karena kekurangan sumber daya materi. Standar hidup yang rendah ini dapat menyebabkan kondisi moral, harga diri, dan kesehatan orang miskin menjadi lebih buruk.

Menurut Suharto (2013) dalam memahami kemiskinan terdapat dua paradigma yaitu paradigma Neo-liberalisme dan Sosial Demokrasi.

- 1) Dalam paradigma neo-liberal, kemiskinan difokuskan pada individu daripada kelompok karena kelemahan atau pilihan hidup individu. Kemiskinan akan hilang seiring dengan peningkatan kekuatan pasar dan pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Untuk memerangi kemiskinan, itu tidak boleh bersifat



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sementara. Keluarga, kelompok swadaya masyarakat, dan lembaga keagamaan juga termasuk dalam kategori ini.

Menurut paradigma sosial demokrat, kemiskinan bukan masalah individu tetapi masalah struktural. Kemiskinan adalah hasil dari ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari kurangnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber daya sosial. Seorang Sosial-Demokrat berpendapat bahwa kesetaraan adalah penting untuk mendapatkan kebebasan dan kemandirian.

Penelitian ini menggabungkan teori paradigma neo-liberal dan sosial demokrat karena keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun, keduanya berfokus pada cara ekonomi dan pemerintah membentuk kebijakan dan keputusan sosial. Pandangan neo-liberal menekankan pentingnya pasar bebas, kebebasan individu, dan pengurangan intervensi pemerintah dalam ekonomi. Di sisi lain, paradigma sosial demokrat berpendapat bahwa pasar bebas harus diimbangi dengan peran pemerintah yang aktif, seperti meningkatkan kesejahteraan sosial dan akses ke layanan publik.

## 2.1 Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal :

### 1. Faktor internal

- a) Sikap : Sikap adalah keadaan jiwa dan pikiran yang siap untuk menanggapi pengalaman yang terorganisir yang mempengaruhi perilaku. Tradisi, budaya, lingkungan sosial, dan gaya hidupnya sangat memengaruhi keadaan jiwa tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) pengalaman dan pengamatan : Pengamatan sosial tentang tingkah laku dapat dipengaruhi oleh pengalaman; ini dapat berasal dari tindakan selbellumnya atau dapat diperoleh dari belajar dari orang lain.

c) Karakter: Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik dan cara berperilaku yang menentukan bagaimana setiap orang berperilaku.

d) Konsep diri : Faktor lain yang mempengaruhi kepribadian seseorang adalah konsep diri. Bagaimana seseorang memperlakukan dirinya akan berdampak pada minat mereka terhadap sesuatu. Konsep diri, yang merupakan inti dari pola kepribadian, akan menentukan bagaimana seseorang berperilaku saat menghadapi masalah dalam hidupnya, yang kemudian mengarah pada perilaku berikutnya.

Faktor eksternal

a) Kelompok referensi: Kelompok yang berinteraksi satu sama lain mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang secara langsung atau tidak langsung, sedangkan kelompok yang tidak berinteraksi mempengaruhi secara tidak langsung.

b) Keluarga: Membentuk sikap dan perilaku terutama dilakukan oleh keluarga. Ini karena cara orang tua membesarkan anak-anak mereka membentuk kebiasaan mereka, yang pada gilirannya memengaruhi sikap dan perilaku mereka secara tidak langsung. memiliki dampak pada cara dia menjalani kehidupannya.

c) Kebudayaan mencakup semua pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang dimiliki setiap individu sebagai





anggota masyarakat. Ini termasuk apa yang dipelajari dari pola pikir, perasaan, dan perilaku.

## 2.2 Dampak Kemiskinan

Muttaqien menunjukkan bahwa dampak kemiskinan sama di mana pun. Dampak dari kemiskinan memiliki akibat bagi penyandanya: kehilangan kesejahteraan (sandang, makanan, dan perumahan), pengucilan dari pekerjaan yang baik secara manusiawi, kehilangan hak atas pendidikan, kehilangan kesehatan, kehilangan rasa aman, kehilangan hak psikologis, dan kehilangan kemampuan untuk hidup bebas. semua adalah hasil dari kemiskinan:

Dampak dari kemiskinan memiliki akibat bagi penyandanya:

### Pengangguran

Kemiskinan menyebabkan pengangguran, yang merupakan dampak dari kemiskinan, karena keterampilan dan pendidikan sulit diperoleh di masyarakat. Akibatnya, sulit bagi masyarakat untuk berkembang. mencari pekerjaan yang memenuhi syarat. Penurunan pendapatan membuat sulit untuk belk karena menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti nutrisi dan kesehatan, serta ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tambahan. Akibatnya, pengangguran hanya bisa makan apa yang mereka miliki karena harga beras terus meningkat. Jika seorang pengangguran tidak dapat memberikan makanan kepada anaknya, itu akan berdampak buruk pada masa depan mereka dan menyebabkan masalah yang bertahan lama. Kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh pengangguran, seperti:

- a) Meningkatkan pengeluaran negara Menyebabkan ketidak stabilan politik
- b) meningkatkan jumlah penduduk miskin, yang meningkatkan beban Dalam upaya mereka untuk mengakhiri kemiskinan, pemerintah terus mengalami kesulitan.





c) Dapat menyebabkan rasa tidak percaya diri dan konflik keluarga.

#### Kriminalitas

Kriminalitas adalah efek lain dari kemiskinan. Orang lupa diri dan mencari solusi instan karena kesulitan mencari nafkah. tanpa mempertimbangkan apakah menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan adalah haram atau halal. Sebagai contoh, perampok, penodongan, pencuri, penipuan, pembejalan, penjambretan, dan banyak lagi jenis kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan.

#### Putus sekolah

Kemiskinan secara alami menyebabkan kehilangan pekerjaan dan kurangnya kesempatan untuk belajar. Disebabkan penutupan selkolah dan kurangnya kesempatan pendidikan, orang miskin tidak akan dapat meningkatkan keterampilan mereka dan mencapai impian mereka. Mereka juga akan menghadapi biaya pendidikan yang mahal.

### 3.3 Pengentasan kemiskinan

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, strategi terdiri dari langkah-langkah yang mencakup program-program yang dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi. sementara Program adalah instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga lamnya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk mendapatkan anggaran atau berpartisipasi dalans kegiatan masyarakat yang diatur oleh lembaga tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bank Dunia mengatakan bahwa strategi pengentasan kemiskinan berubah setiap sepuluh tahun, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, kemajuan dalam pendidikan dan kesehatan, perlindungan, dan pemberdayaan kaum miskin.

Menurut Bank Dunia metode pengentasan kemiskinan yang paling efektif terdiri dari dua komponen yang saling bergantung dan sama nilainya:

- a) Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat miskin sehingga mereka dapat memperoleh sumber pendapatan melalui strategi pembangunan yang mendorong penggunaan tenaga kerja yang efektif;
- b) Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat miskin, seperti pendidikan dan kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Gunnar Adler Karlsson mengusulkan beberapa strategi untuk memerangsang pengentasan kemiskinan, yang dikutip Andre Bayo Ala (1981) antara lain:

- a) strategi jangka pendek, yang melibatkan pemindahan sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai untuk memperbaiki keadaan kemiskinan dalam jangka pendek, misalnya dengan menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusi sumber daya
  - b) strategi jangka panjang, yang melibatkan peningkatan swadaya setempat
- Perbaikan dalam jangka pendek Strategi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan terdiri dari dua komponen utama Yang pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan.

Dalam program pengentasan kemiskinan, konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dapat berbeda tergantung pada kebiasaan dan metode perencanaan yang digunakan.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut John Friedmann, ada setidaknya empat jenis tradisi

perencanaan: reformasi sosial (reformasi sosial), di mana negara menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan untuk dilaksanakan oleh masyarakat,

analisis kebijakan (policy analysis), di mana para penentu kebijakan (pemerintah dan pihak terkait lainnya) menggunakan analisis data ilmiah untuk menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat,

Lakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara kolektif dengan bantuan ahli dan dengan bantuan masyarakat, dan

Perencanaan sebagai Gerakan.

Untuk mengetahui titik berat dari strategi pengentasan kemiskinan yang dijalankan, model pembangunan yang mendasari program pengentasan kemiskinan dapat digunakan untuk melihat jenis program tersebut.

Empat model pembangunan umum digunakan oleh negara berkembang. Sumbernya pendapatan nasional adalah fokus model pembangunan I, pemenuhan kebutuhan pokok dan dasar adalah fokus model II, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah fokus model III. Semua model ini berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui partisipasi masyarakat dan kelompok sasaran dalam menentukan kebutuhan dan partisipasi mereka dalam proses pembangunan sementara. Untuk menghadapi era otonomi daerah dan globalisasi, peningkatan daya saing adalah fokus model pembangunan IV. Sasaran peran pemerintah daerah, masyarakat umum, dan penerima sasaran program, dan pelaksanaan program di tingkat pemerintah nasional





## 2.4 Peran Dinas Sosial

Dinas sosial, juga disebut lembaga sosial, adalah organisasi yang memiliki struktur atau pekerja sosial dan diatur dalam pemerintahan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun masyarakat, dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan masyarakat.

Menurut Ramadhani, Sarbaini, dan Matnuh (2016: 949), dinas sosial memiliki tugas utama melaksanakan urusan bantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan pembinaan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial membantu dinas sosial melaksanakan tugasnya.

Sebagai pelaksana bidang kesejahteraan sosial dinas sosial memiliki peran untuk menilai program pengentasan kemiskinan, evaluasi dapat dilakukan terhadap perencanaan program, model pembangunan yang dirumuskan, dan pelaksanaannya. Kriteria yang digunakan untuk menilai pelaksanaan program meliputi: penentuan sasaran dan data yang digunakan untuk menentukan sasaran, peran pemerintah daerah, masyarakat umum, dan penerima sasaran program, dan pelaksanaan program di tingkat pemerintah nasional.

Sebagai pelaksana bidang kesejahteraan sosial dinas sosial memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat seperti mengelola program bantuan sosial, pemberdayaan sosial, pemantauan dan penanganan sosial. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi menjalankan fungsi pelaksanaan dan pembinaan teknik dalam rangka pelayanan usaha sosial, termasuk melaksanakan dan melakukan pembinaan dalam bidang penyuluhan dan bimbingan sosial, serta memberikan motivasi, pemantauan, dan konsultasi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- 2022
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Menurut Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kuantan singingi pasal 3 menyatakan bahwa : dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dengan hal ini tidak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran, seperti halnya dinas sosial dalam menjalankan peran dibutuhkan tanggung jawab untuk menjalankan sebuah organisasi sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan dan pembinaan di bidang sosial dan tenaga kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

#### 1) Susunan Organisasi Dinas Sosial

Menurut Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial, pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Pasal 3 menyatakan bahwa :

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:

1. kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Subbagian Umum
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi sosial, membawahkan:

a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:

a. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:

a. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Menurut Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2022

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas

sosial, pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Pasal menyatakan

bahwa

a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan

desa.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas

Sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang



© Hakipta mik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### 2.5 Kemiskinan dalam pandangan Islam

Kemiskinan dilihat dalam Islam sebagai masalah yang mengancam kekuatan dan iman seseorang karena berhubungan dengan kekufuran. Seseorang yang tinggal di bawah tingkat kemiskinan, orang tidak dapat memenuhi kewajiban agamanya, mendapatkan pendidikan yang baik, dan mendapatkan perawatan medis yang baik, serta kehidupan yang layak. Sebagaimana Allah berfirman: (Q.S An-Nisa":9).

سَدِيدًا قَوْلًا وَلَيَقُولُوا اللَّهُ فَايْتَنَّا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوْا لَوِ الَّذِينَ وَلِيْحَشَ

Artinya: "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)". (Q.S An-Nisa":9).

Akibatnya, agama islam melarang umat-umatnya mewariskan kesulitan kepada keturunan mereka dalam hal agama, ilmu, atau keuangan, yang dapat menyebabkan mereka menjadi tidak dapat diandalkan. Dinas sosial dapat menjadi sarana untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang miskin sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang kuat dalam agama Islam untuk membantu yang kurang beruntung. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan juga ditekankan dalam Islam, yang sejalan dengan usaha pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan. Menurut Reitsma dan Kleinpenning, kemiskinan adalah ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik material maupun non-material.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Al-Quran menganggap setiap orang yang membutuhkan bantuan adalah miskin atau membutuhkan. Semasa hidupnya, orang yang miskin, terlakang, atau bodoh tidak akan dianggap baik atau berkualitas. Terlebih lagi, ini secara doktrin bukanlah cita-cita Islam. Ayat lain yang lebih tepat dan dijadikan dalil dalam upaya memperoleh kesejahteraan ekonomi adalah al-Qashas/28:77

تَّبِعْ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنَ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيْبِكَ تَتَسَّ وَلَا الْأَخْرَةَ الدَّارَ اللَّهُ أَنْتَكَ فِيمَا وَابْتِغِ الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ

Artinya: "Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan". (Q.S al-Qashas/28:77)

Menurut islam faktor-faktor kemiskinan diantaranya ialah Q.S Al-Baqarah/2:273

Artinya: "Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakan, sungguh, Allah Maha mengetahui". (Q.S Al-Baqarah/2:273)

Selain itu, agama Islam menawarkan beberapa cara untuk mengatasi kemiskinan, seperti zakat, yang merupakan sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan kelompok lainnya, sesuai dengan peraturan Syariah; infak wajib yang sifatnya incidental; membantu orang miskin sebagai ganti dari





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kewajiban agama, seperti membayar fidyah; dan membantu orang miskin dengan Sedekah, infak, hadiah, dan lain-lain adalah hal-hal yang dianjurkan dilakukan. Tentu saja, semua hal di atas dimaksudkan untuk mereka yang memiliki dana yang cukup. Namun, itu juga dianjurkan untuk mereka yang tidak mampu, dengan memberikan nasihat, semangat, dan inspirasi kepada sesama..

Pendapatan nasional dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan suatu negara karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi, dan layanan publik lainnya. Sebagai agama Allah, Islam mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat, dan ekonomi merupakan aspek penting dari kehidupan manusia. Dua pedoman Islam, Alquran dan Hadits, memberikan pesannya. Banyak ayat-ayat Al-Quran memuji kecukupan dalam menjelaskan perspektif Islam tentang kemiskinan.

## 6 Penelitian Terdahulu

No.	Sumber	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Judul: Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang Undang nomor 11	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bone telah melakukan tugasnya untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten.	Perbedaan Penelitian Heryanti dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bone, yang menangani kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, berbeda dengan Penelitian ini



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Sumber	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). (Heryanti, 2019)	2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kabupaten Bone masih belum mencapai tingkat kemiskinan yang optimal, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan angka kemiskinan setiap tahunnya. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam mengatasi kemiskinan adalah kekurangan dana pemerintah, kurangnya sumber daya manusia, dan tingkat kemiskinan yang tinggi.	dilakukan di Dinas Sosial di kabupaten Kuantan Singing dan berfokus pada peran yang dimainkannya dalam menangani kemiskinan.
2.	Judul: Peran Dinas Sosial dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas	penelitian Muslim Sabarisman dilakukan di



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Sumber	Kesimpulan	Perbedaan
© Hakiptam UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. (M Sabarisman, 2015).	sosial Kota Sukabumi belum mencapai tujuan dalam penanggulangan kemiskinan secara optimal. Ini karena masih sumber daya manusia yang terbatas secara kualitas dan jumlah, anggaran yang tidak memadai, koordinasi yang buruk, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjalankan program. Penelitian menunjukkan bahwa dinas sosial harus meningkatkan intensitas konsultasi dengan instansi sosial provinsi dan pusat dan meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dengan instansi terkait di	Kota Sukabumi, tetapi penelitian ini dilakukan di kabupaten kuatan singingi. Penelitian ini Sama-sama berfokus pada bagaimana Dinas Sosial menangani kemiskinan.



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Sumber	Kesimpulan	Perbedaan
1.	<p>© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Judul: Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar). (AH Drajat, 2021)</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>daerah.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Keluarga Harapan (PKH) sudah dapat dianggap efektif dalam memerangi kemiskinan. dilihat dari beberapa indikator efektivitas, tetapi masih ada beberapa masalah. Ini termasuk ATM yang hilang, pemahaman sosialisasi yang kurang diterima, konflik antar stakeholder, dan medan yang sulit.</p>	<p>Penelitian Anwar Hakim Drajat dan Septa Ekasari berbeda karena penelitian mereka berfokus pada penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini melihat peran Dinas Sosial secara keseluruhan dalam mengurangi kemiskinan yang dilakukan di dinas sosial Kuantan Singing.</p>

## 2.7 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan suatu untuk membangun persamaan persepsi dan pengertian serta menghindari salah pengertian terhadap istilah kata yang digunakan pada judul ini, maka akan di operasionalkan beberapa konsep yang bersifat membatasi.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis iri tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Adapun disini yang berperan dalam benagulangan kemiskinan tersebut yaitu masyarakat miskin, Dinas sosial kabupaten kuantan singingi.

Kemiskinan adalah ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, penginapan dan lain sebagainya. Pengertian kemiskinan menurut Reitsma dan Kleinpenning adalah ketidak berdayaan orang untuk mengatasi masalah mereka, baik materi maupun non materi.

Pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Fenomena kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensional, yang tidak semata-mata berkaitan dengan aspek kesejahteraan se cara materil Oleh karena itu, strategil pengentasan kemiskinan harus mempertimbangkan karakteristik kemiskinan dan potensi yang layak untuk dikembangkan

Dinas sosial adalah lembaga yang dikenal sebagai lembaga sosial dimana pekerja strutural atau sosial secara teratur menjalankan tata kelola sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun masyarakat dan melayani kepentingan publik yang terkait dengan masyarakat

5. Aspek pendidikan adalah suatu proses bimbingan, tuntunan, atau pimpinan yang melibatkan unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan, dan sebagainya. Aspek-aspek paling dipertimbangkan antara lain yaitu kesadaran,

pencerahan, pemberdayaan, dan perubahan perilaku. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup segala aspek pembentukan karakter, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membentuk manusia menjadi individu yang lebih baik.

Aspek fasilitasi adalah proses yang bertujuan untuk memudahkan atau membantu individu atau kelompok dalam mencapai tujuan atau melakukan perubahan. Seorang fasilitator bertindak sebagai penghubung atau mediator untuk memperlancar jalannya proses tersebut

Aspek Kesejahteraan sosial adalah suatu tata usaha kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritumaterial maupun spiritual



- © Hakipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.8 Konsep operasional

**Tabel 2.1**  
**Konsep Operasional Penelitian**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Permensos Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	1. Aspek pendidikan	a. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan b. Tidak terjadinya putus sekolah pada anak
	2. Aspek fasilitasi	a. Memberikan program perlindungan sosial b. Penyediaan bantuan sosial
	3. Aspek kesejahteraan sosial	a. Bantuan sosial untuk masyarakat miskin b. ketersediaan program bantuan sosial

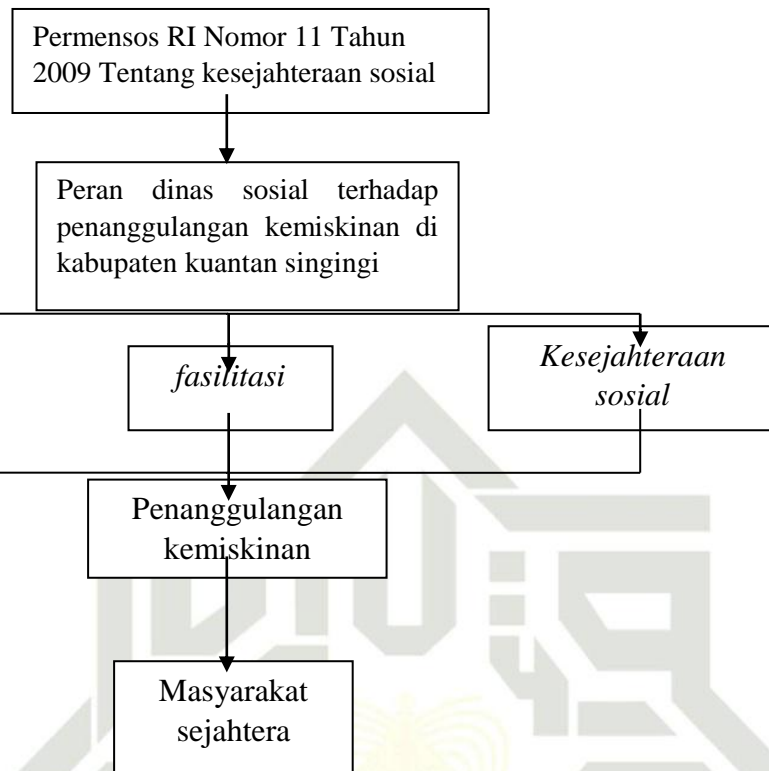
Sumbre: Permensos RI Nomor 11 Tahun 2009

## 2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian. Kerangka berfikir digunakan untuk mengukur variable. Indikator peran dinas sosial dalam penanggulangan angka kemiskinan di kabupaten Kuantan Singingi. Berikut gambaran dari kerangka berfikir penelitian peran dinas sosial dalam penanggulangan angka kemiskinan di Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyalin dan menyebarkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan suatu subjek dan objeknya, termasuk individu, lembaga, masyarakat, dan sebagainya. Hasil penelitian ini juga didasarkan pada observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian kualitatif tidak hanya menentukan cara mengumpulkan data melainkan juga bagaimana menganalisis data.

Alasan penulis menggunakan jenis kualitatif yaitu untuk mengetahui peran yang membutuhkan masukan serta saran yang dapat diwawancarakan baik dari instansi terkait maupun Masyarakat itu sendiri.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. Maka penelitian ini dilakukan di kabupaten kuantan singingi tentang peran dinas sosial terhadap penanggulangan kemiskinan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dari bulan Januari - Maret 2024.

#### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang masalah atau masalah tertentu yang memungkinkan untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Informan tersebut dapat



berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang membantu pemahaman tentang masalah atau masalah yang diteliti. Penulis menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan subjek penelitian ini. Metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dikenal sebagai pengambilan sampel purposive. Dengan metode ini, diharapkan standar sampel yang dihasilkan sesuai dengan subjek penelitian dan dapat menjelaskan keadaan sebenarnya dari subjek yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini merupakan orang yang di anggap mempunyai pengetahuan tentang masalah yang sedang diteliti.

**Tabel 3.1**  
**Informan penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala dinas sosial kabupaten kuantan singingi	1 orang
2.	Kabid pemberdayaan sosial	1 orang
3.	Pegawai bidang pemberdayaan sosial	1 orang
4.	Pendamping desa	1 orang
5.	Masyarakat miskin	5 orang
	Jumlah	9 orang

Sumber: Data Olahan Tahun 2024

#### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Koentjaraningrat dalam (Zulganef: 2013: 159) data merupakan sebagai catatan-catatan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil wawancara pengamatan, catatan mengenai perhitungan-perhitungan jumlah dan frekuensi Kegiatan-Kegiatan Sosial, Catatan Mengenai Pengukuran-Pengukuran Bidang, volume dan intensitas benda dan aktifitas kebudayaan, catatan-catatan kutipan dari bahan dokumen dan surat kabar.



Data yang diperoleh dan berhasil peneliti kumpulkan antara lain:

1. Data primer

Data yang di peroleh langsung dari responden mengenai upaya- upaya yang di lakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten kuantan singingi dalam penanggulangan kemiskinan yang muncul di kabupaten kuantan singingi serta tanggapan masyarakat kabupaten kuantan singingi terhadap peraanan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten kuantan singingi

2. Data Sekunder

Data mengenai gambaran umum jumlah pegawai Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten kuantan singingi, serta Tugas dan Fungsi Pegawai Dinas Sosial kabupaten kuantan singingi. Sedangkan data lainnya berupa jumlah penduduk miskin kabupaten kuantan singingi dan kemiskinan yang di timbulkan pada tahun 2018 sampai tahun 2022.

## 5.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah tindakan mengamati subjek penelitian secara langsung. Ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati kondisi lingkungan subjek penelitian secara langsung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian.

b. Wawancara

Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi adalah melalui wawancara atau berhubungan langsung dengan informan. Informasi tidak tertulis dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat dalam penelitian melalui



pernyataan verbal mereka. Informasi ini kemudian didokumentasikan dalam laporan ini.

### c. Dokumentasi

Data yang di peroleh berupa dokumen yang di ambil melalui dokumentasi.

Oleh karena itu , teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa foto atau gambar, buku, arsip yang bersangkutan dengan tujuan penelitian ini sebagai pelengkap data primer.

## 3.6 Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, di analisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) mengungkapkan bahwa dalam pengolahan data kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono: 2012: 247). Pada tahap ini peneliti memilih informasi mana yang relevan dan yang mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut. Semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

### b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan





- sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait Peranan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.
- Penarikan kesimpulan Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di kawasan Teluk Kuantan, sekitar 3 km dari ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 4.2 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak di Pulau Sumatra dengan posisi antara 0 00 – 1 0 00 Lintang Selatan dan 1010 02 – 1010 55 Bujur Timur, secara geokonomi dan geopolitik Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada jalur tengah lintas Sumatra dan berada dibagian Selatan Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi ini merupakan dahulunya bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Terjadi pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999. Wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi yang semula terdiri dari 12 Kecamatan, kemudian bertambah menjadi 15 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 yaitu : Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Benai, Kecamatan Inuman, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Singingi.



Kabupaten Kuantan Singing memiliki luas wilayah sekitaran 7.656,03 km<sup>2</sup>

terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah setinggi 25–30 meter di atas permukaan laut. Di wilayah ini, dataran tinggi berbukit dengan ketinggian 5-300 dan berbukit mencapai ketinggian 400–800 meter di atas permukaan laut. Sungai Kuantan dan Sungai Singingi adalah dua sungai besar yang melintasi Kabupaten Kuantan Singingi. Sungai-sungai ini sangat penting untuk menghasilkan listrik melalui transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan, dan sumber daya buatan.

Sebab itu, batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Secara morfologi, Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi, dan pegunungan. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari perbukitan bergelombang, yang berada sekitar 3<sup>0</sup>-15<sup>0</sup> kaki di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki struktur geologi yang terdiri dari patahan naik, patahan mendatar, dan lipatan yang terdiri dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik, dan instruksi serta endapan di atas permukaan. Selain itu, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki berbagai potensi sumber daya mineral. Sungai Kuantan / Indragiri dan Sungai Singingi adalah dua sungai besar yang melintasi Kabupaten Kuantan Singingi. Kedua sungai ini memiliki peran penting dalam hal transportasi dan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penyediaan air, air bersih, perikanan, dan dapat digunakan sebagai sumber daya manusia untuk menghasilkan listrik tenaga air.

Daerah aliran sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan dan Kecamatan Cerenti. Daerah aliran sungai (DAS) Singingi mengalir 2 Kecamatan yaitu, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

### 4.3 Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi :

#### Visi :

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang berbudaya, religius, maju, bermarwah, sejahterah dan harmonis” (Kuantan Singingi sebagai Negeri **BERMARWAH** di Provinsi Riau Tahun 2026).

#### Misi :

1. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat jiwa batobo dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya dan bermatabat.
2. Terwujudnya manajem birokrasi pemerintah yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis.
3. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing.
4. Terwujudnya kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan potensi sektor unggulan daerah.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hakipta milik UIN Suska Riau

Kategori: Kateslanje University of Sultan Sarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang andal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

#### 4. Sejarah Singkat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi muncul bersamaan dengan pembentukan provinsi Riau pada tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 yang menyerahkannya sebagai urusan pemerintahan. pusat dan daerah swantara 1 Riau menjadi daerah otonomi pada tanggal 1 September 1958 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swantara 1 Riau No.250/22D/58. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kuantan Singingi.

Salah satu fungsi utama Dinas Sosial pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kuantan Singingi adalah menjalankan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, dan desa.

Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Sosial pemberdayaan masyarakat dan desa.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Sosial pemberdayaan masyarakat dan desa.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 5. Visi dan Misi Dinas Sosial pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kuantan Singingi

Visi adalah suatu tujuan yang akan dicapai di masa depan, tetapi belum terwujud saat ini. Visi menunjukkan semua hal yang akan terjadi di masa depan dilakukan sekarang.

Menurut T. Hani Handoko dalam Ahadi, Nopri (2004), misi juga dapat diartikan sebagai pernyataan umum dan abadi tentang maksud organisasi. Selain itu, misi juga dapat diartikan sebagai pernyataan karakteristik dari proses aktivitas organisasi yang dilakukan. dirancang dengan cara yang sistematis dan menunjukkan karakteristik organisasi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam berbagai kegiatan dan program sosial dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Kuantan Singingi. Sejalan dengan hal tersebut, Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

*“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMAWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026”*

Adapun makna pernyataan visi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



- © Hak Cipta © UIN Suska Riau  
 State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**BERBUDAYA** mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mendepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan local.

**RELIGIUS** mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat serta menjadi pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang.

**MAJU** mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, tata ruang serta lingkungan hidup yang lebih baik sehingga terwujud akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan hasil hasil pembangunan;

4. **BERWAWASAN** mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada penguasaan ilmu





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengetahuan serta teknologi informasi, sehingga terwujud birokrasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban yang tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, berwawasan kedepan serta berorientasi pelayanan publik yang prima;

**SEJAHTERA** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan

**HARMONIS** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi, seimbang antara semua komponen masyarakat serta pelaku pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

#### **MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dirumuskan penjelasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 meliputi :

1. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbudaya dan bermartabat; Untuk meningkatkan Pembangunan keagamaan dan kebudayaan, melalui peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan serta peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya.

Terdwujudnya manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;

Untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang berprofesional dan peningkatan kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing; Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya asing, melalui Pendidikan, Kesehatan dan pengarusutamaan gender, selain itu untuk juga meningkatkan produktivitas atau daya asing kepemudaan dan kualitas hidup Perempuan.

Terdwujudnya kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah; Untuk meningkatkan kualitas Pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur pemukiman, infrastruktur pemerintah, infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

5. Terdapatnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas Pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah,



infrastruktur pemukiman, infrastruktur pemerintah, infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

### MOTTO

Motto Pelayanan Dinas Sosisl Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu: HADIR

### BERSAMA

a) Humanis

b) Adaptif

c) Dedikatif

d) Inklusif

e) Responsif

f) BERSama

g) Desa

h) Sejahtera

### 4.6 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi

Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang dimaksudkan untuk menentukan bagaimana organisasi dapat beroperasi secara hierarkis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, tiap bidang memiliki tugas dan fungsi utama yang harus diselesaikan. Struktur organisasi memungkinkan organisasi layanan sosial berjalan dengan lancar, mudah, dan efektif, dan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang relevan.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi:

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten**



## Kuantan Singingi

### 1.7 Uraian Tugas Bagian dan Fungsi /Unit Dinas Sosial

#### 1. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas

1. Membantu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang sosial dan Masyarakat desa.

Fungsi Kepala Dinas

1. Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 2. Sekretaris

### Tugas Sekretaris

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi ke pada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas sosial pemberdayaan Masyarakat dan desa.

### Fungsi Sekretaris

- a) Melaksanaa urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan Masyarakat, arsip dan dokumentasib, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan barang milik daerah.
- b) Penyusunan rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang sosial pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- c) Pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bantu oleh sub bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sub bagian umum mempunyai tugas
  - a) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada sub bagian umum.
  - b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbagian umum.
  - c) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Subbagian Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Maklupmik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- d) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum.
  - e) Mengendalikan dan mendistribusikan surat menyurat.
  - f) Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian.
  - g) Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan.
  - h) Melaksanakan penegakan disiplin pegawai.
  - i) Membuat laporan perkembangan kepegawaian menyelenggarakan urusan kehumasan
  - j) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
  - k) Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
  - l) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga; melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang
  - m) Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara.
  - n) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Jabatan Fungsional Substansi Keuangan
- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Keuangan.



- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Keuangan.
  - c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Keuangan; mengkoordinasikan dan menyusun rencana anggaran keuangan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - d) Melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - e) Mengelola keuangan dan penyiapan gaji pegawai.
  - f) Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran.
  - g) Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
  - h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan para Substansi Keuangan.
  - i) Dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Jabatan Fungsional Substansi Program**
- a) Merencanakan program/kegiatan dari penganggaran pada Substansi Program.
  - b) Melaksanakan inventarisasi data dari informasi Substansi Program.
  - c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Program.
  - d) Mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji, menganalisa, menyajikan dan menginformasikan data bidang Sekretariat Umum Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Melaksanakan penyusunan serta evaluasi dan pelaporan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

f) Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan kegiatan tahunan; melaksanakan pemantauari, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Program.

g) Dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**

Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Sosial.

Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

- a) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pemberdayaan sosial.
- b) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitai dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan sosial.
- c) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial.
- d) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Kepala Bidang pemberdayaan Desa

Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Desa melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan desa.

##### Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Desa

Penyusunan program kerja rencana operasional pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Desa.

Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

##### Fungsi Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitas Sosial

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporari kebijakan teknis di bidang Jaminari Sosial, Bencana dan Rehabilitasi Sosial.

##### Fungsi Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitas Sosial

a) Penyusunan Program kerja dan rencana operasional pada bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitas Sosial.

b) Koordinasi, fasilitasi, dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitas Sosial.





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitas Sosial.

d) Penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitas Sosial.

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

f) Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

g) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

h) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

i) Penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

j) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengidentifikasi sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dilapangan mengenai “Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi”, peneliti menyimpulkan bahwa Peran Dians Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten Kuantan Singingi dari segi aspek Pendidikan Dinas Sosial berperan mendukung akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui berbagai program bantuan, terutama untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa menenyam pendidikan. Dalam hal fasilitasi, Dinas Sosial mengidentifikasi penerima program perlindungan sosial melalui verifikasi dan pembaruan data. Namun, masih ada tantangan terkait ketidak akuratan data penduduk miskin, yang berdampak pada distribusi bantuan yang tidak merata. Dinas Sosial terus berupaya untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar lebih adil dan efisien, serta memastikan bahwa indikator kinerja program berjalan optimal. Aspek Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui berbagai program bantuan sosial seperti PKH, dan program lainnya. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meskipun keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan utama. Masyarakat merasakan dampak positif dari bantuan sosial, namun tantangan dalam hal aksesibilitas, sosialisasi program. Dinas Sosial juga terus mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas program bantuan, agar dapat berdampak lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

## BAB VI

## PENUTUP



## 6.2 Saran

Melalui penelitian “Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi” ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat diharapkan adanya kesadaran diri dan pemahaman untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Serta diharapkan, adanya kesadaran diri Masyarakat yang mampu agar tidak mengambil hak Masyarakat yang kurang mampu.
2. Kepada Dinas sosial Kabupaten Kuantan Singingi Diharapkan agar selalu dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam penguatan system pendataan, peningkatan kolaborasi dan koordinasi dengan Lembaga terkait, pelatihan dan pemberdayaan SDM mendorong inovasi dari tim. Transparansi dan akuntabilitas yaitu publikasi data dan program secara terbuka, peningkatan akses dan sosialisai program ke daerah terpencil.
3. Untuk Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif perbaiki system pendataan dan distribusi bantuan, perlu memperluas Upaya pemberdayaan ekonomi berbasis keterampilan dan kewirausahaan, lebih aktif dalam melibatkan sektor swasta dan LSM dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau  
Safety  
Islam Riau

### Alquran

- An-nisa ayat 9
- al-Qashas ayat 77
- Al-Baqarah ayat 273

### Buku:

- Abu Ahmadi, 2009. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alifian, 2009, Kemiskinan Struktural. Jakarta Pusat.
- Ady Suhardono, 1994. Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Ahmad Nurhudin, A, 2012 Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika aditama.
- Ahmad Friedman, John. 1987. Planning in The Public Domain (From Knowledge to Action). Princeton University Pers.
- Amanto Sunarto, 2004. Pengantar Sosiologi, Jakarta: Kencana Pustaka
- Nurhadi. 2007. *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana
- Harso, Bernand, 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Remi, Sutiyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Suharno. 2013. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Supriatna T. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta: Rineka Cipta; 2000.

### Skripsi/Jurnal

- Aliyafie, M. (2023). *Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan. Kota Palu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Arifin, D. (2013). *Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak (Studi Kasus di Kecamatan Sei Mandau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank, W. (2007). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *The World Bank*, 112(483), 211-212.

Darajat, A. H., & Ekasari, S. (2021). Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar). *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 10(1), 8-14.

Fitri, M. (2023). *Peran Dinas Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Heryanti, H. (2019). Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). *Jurnal Al-Dustur*, 2(2), 46-72.

Sabarisman, M. (2015). Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *Sosio Konsepsia*, 194-205.

Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68-74.

Wisnutama, A., Pramono, J., & Haryanto, A. T. (2023). Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. *Jl@ P*, 12(2).

Murdiyatmoko, J. (2007). *Sosiologi: memahami dan mengkaji masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama.

Suhardono, E. (2016). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama.

Sudantoko, H. D. (2009). *Dasar-dasar pengantar ekonomi pembangunan*. PP. Mardi Mulyo.

Maulana, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 220-229.

Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 73-96.

Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya penanggulangan kemiskinan ekonomi di Indonesia melalui perspektif pekerja sosial. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72.



Ramadhani, M., & Matnuh, S. H. (2016). Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11).

Zulyanto, A. (2022). Pendidikan Dan Pengentasan Kemiskinan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 32-40.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kuantan singingi pasal 2

1. Hak Cipta dilindungi undang-undang.
  2. Dilarang mengutip, menjiplak, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### **Indikator Pertama, Aspek Pendidikan**

#### **Sub Indikator Pertama, terpenuhinya kebutuhan pendidikan**

pertanyaan untuk dinas sosial:

- 1) Apakah Dinas Sosial berperan dalam memenuhi pendidikan bagi masyarakat miskin?
- 2) Apakah ada program atau kebijakan khusus yang mendukung akses pendidikan bagi masyarakat miskin?

#### **Sub Indikator Kedua, memberikan pendidikan yang berkualitas**

- 1) Apakah kebijakan atau program yang telah di terapkan itu benar-benar dapat memfasilitasi dan mendukung pendidikan masyarakat miskin tersebut?
- 2) Bagaimana Dinas Sosial Memastikan bahwasanya telah memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat miskin?

Pertanyaan untuk masyarakat:

- 1) Menurut saudara bagaimana anda menilai kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh dinas sosial?
- 2) Menurut saudara apakah ada program pendidikan yang disediakan oleh dinas sosial?
- 3) Apakah saudara merasa bahwa dinas sosial telah memenuhi kebutuhan pendidikan?
- 4) Menurut saudara bagaimana program pendidikan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat miskin?



- 5) Menurut saudara bagaimana cara masyarakat mengakses program pendidikan yang diberikan oleh Dinas Sosial?

**6. Indikator Kedua, Aspek Fasilitas**

**Sub Indikator Pertama, memberikan program perlindungan sosial**

- 1) Bagaimana Dinas Sosial mengidentifikasi dan memverifikasi penerimaan manfaat program perlindungan sosial?
- 2) Bagaimana Dinas Sosial mengukur dampak perlindungan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat?

**Sub Indikator Kedua, penyediaan bantuan sosial**

- 1) Apakah ada kriteria khusus yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan?
- 2) Apakah ada indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program?

Pertanyaan untuk masyarakat:

- 1) Menurut saudara bagaimana masyarakat merasakan dampak dari program perlindungan sosial yang di berikan oleh dinas sosial?
- 2) Menurut saudara bagaimana cara dinas sosial menyeimbangkan distribusi bantuan sosial agar semua lapisan masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan sosial?
- 3) Menurut saudara apakah ada tantangan yang dihadapi masyarakat miskin dalam mengakses bantuan sosial?
- 4) Menurut saudara apakah saudara merasa puas dengan bantuan dan layanan Dinas Sosial?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- 5) Menurut saudara apakah saudara pernah tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial?

### **Indikator Ketiga, Aspek Kesejahteraan Sosial**

#### **Sub Indikator Pertama, bantuan sosial untuk masyarakat miskin**

- 1) Apa upaya dinas sosial dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin?
- 2) Bagaimana metode sosialisasi program bantuan sosial dilakukan?

#### **Sub Indikator Kedua, ketersediaan program bantuan sosial**

- 1) Bagaimana Proses perencanaan dan evaluasi program bantuan sosial dilakukan oleh dinas sosial?
- 2) Apakah Dinas Sosial memiliki langkah strategis untuk meningkatkan keefektifitas program-program bantuan sosial?

Pertanyaan untuk masyarakat:

- 1) Menurut saudara apa manfaat bantuan sosial bagi masyarakat miskin?
- 2) Menurut saudara bagaimana dampak bansos terhadap kesejahteraan masyarakat miskin?
- 3) Menurut saudara apa saja persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan sosial?
- 4) Menurut saudara bagaimana masyarakat menilai perubahan hidup mereka setelah menerima bantuan sosial dari Dinas Sosial?
- 5) Menurut saudara apa harapan saudara mengenai Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat?

#### **D. Rumusan masalah kedua, kendala**

- 1) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh dinas sosial dalam menanggulangi kemiskinan?

## FOTO DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**Gambar 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Gambar 2. Pegawai Bidang Pemberdayaan Sosial**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

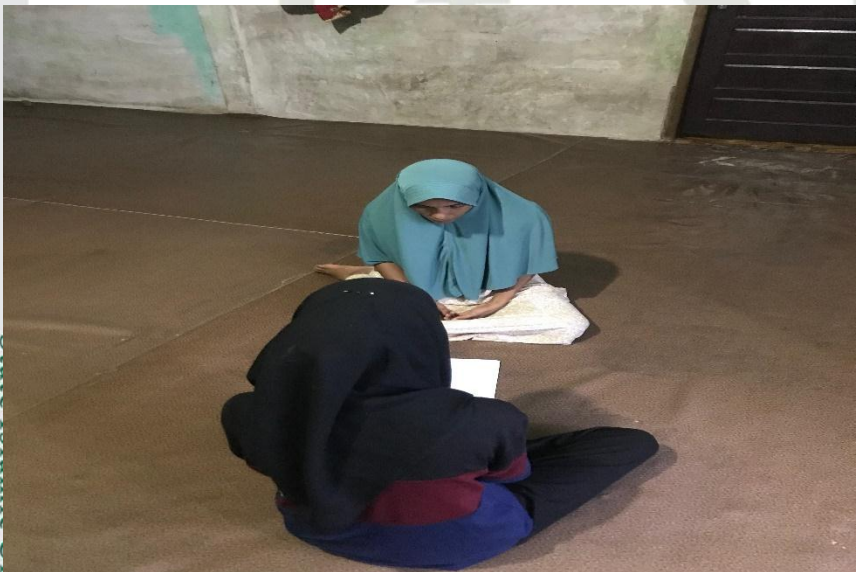


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 3. Pendamping Desa**



**Gambar 4. Masyarakat**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**Gambar 5. Masyarakat**



**Gambar 6. Masyarakat**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**Gambar 7. Masyarakat**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3341/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 21 Mei 2024 M  
 13 Zulqaidah 1445 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Emilda Rosita  
 NIM. : 12070526791  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten  
 Kuantan Singingi"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan  
 bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3305/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/05/2024 Pekanbaru, 20 Mei 2024 M  
Sifat : Biasa 12 Zulqaidah 1445 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Emilda Rosita  
NIM : 12070526791  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

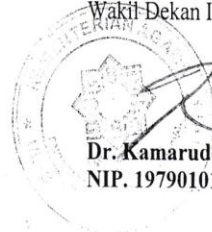
**"PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan I



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : [dpmpmsp@kuansing.go.id](mailto:dpmpmsp@kuansing.go.id), Website : <https://dpmpmsp.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

### REKOMENDASI

Nomor : 146/DPMPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2024

Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:B-3341/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024 Tanggal 21 MEI 2024.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	<b>EMILDA ROSITA</b>
NIM	:	12070526791
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	"PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	<b>DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI!</b>

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
- Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kuantan Singingi,**

**JHON PITTE ALSI, S. IP**  
Pembina Tk. I. IV/b  
NIP 19801012 200501 1 006



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
- Instansi terkait;
- Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Website: <https://disospemdes.kuansing.go.id>  
E-mail: [@disospemdes.kuansing.go.id](mailto:@disospemdes.kuansing.go.id)  
TELUK KUANTAN

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/DINSOSPMD-Sekr/2024/331

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERKASMAWATI, SE  
Nip : 19700406 200701 2 004  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I /IIIId  
Jabatan : Kasubbag Umum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EMILDA ROSITA  
Nim : 12070526791  
Jenjang : S1  
Judul Penelitian : "PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI "

Telah melakukan proses pengumpulan data sehubungan dengan penelitian penulisan proposal/skripsi yang bersangkutan di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi terhitung mulai tanggal 21 juni 2024 sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Teluk Kuantan

Pada tanggal : 23 juli 2024

a.n. KEPALA DINAS  
KASUBBAG UMUM

ERKASMAWATI, SE

Penata Tk.I/IIIId

Nip. 19700406 200701 2 004